

**TESIS**

**KAMPANYE PADA TAHAPAN PEMUNGUTAN  
SUARA ULANG PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH DALAM PERSFEKTIF HUKUM  
PIDANA**



**Oleh**

**MARTIN LEONARDO SIAGIAN  
NIM. 22202115310031**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**Juni 2024**

**KAMPANYE PADA TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA  
ULANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**TESIS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh**

**MARTIN LEONARDO SIAGIAN  
NIM. 22202115310031**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN**

**Juni 2024**

**Judul Tesis : KAMPANYE PADA TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG  
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
PIDANA**

**Nam : Martin Leonardo Siagian**

**NIM : 22202115310031**

**Disetujui,  
Komisi Pendamping**

**Pembimbing Utama**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui,**

**Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615 200312 1 001**

**Tanggal Lulus :**

**Tanggal Wisuda :**

**Tesis Ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui  
Pada Tanggal.....**

**Pembimbing**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004**

**Disahkan oleh  
Koordinator Program Magister Hukum**



**Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H  
NIP. 19750615 200312 1 001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan

Di depan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal.....

Susunan Panitia Penilai

Ketua	: Prof. Dr. H. MISPANSYAH, S.H., M.H.
Sekretaris	: Dr. Hj. NURUNNISA, S.H., M.H.
Anggota	: Prof. Dr. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H.

**TESIS INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK  
ORANG TUA SAYA DAN MERTUA SAYA  
ISTRI SAYA TERCINTA NATALIA CLEMENTY BR. PAKPAHAN  
ANAK SAYA NATHANIA VALLERY SIAGIAN DAN HANNA QUINCY  
SIAGIAN  
KARENA MEREKA YANG SELALU MENDOAKAN, MEMBERI  
NASIHAT, SERTA MEMBERI DUKUNGAN DALAM HIDUP SAYA INI  
TANPA MEREKA SAYA TIDAK AKAN MENJADI INDIVIDU SEPERTI  
SEKARANG INI**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Martin Leonardo Siagian

NIM : 22202115310031

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Sistem dan Peradilan Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 27 Juni 2024

Yang membuat pernyataan

Martin Leonardo Siagian

NIM. 2220211531003



**SIAGIAN, MARTIN LEONARDO, 2024. KAMPANYE PADA TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.** Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** 100 halaman.

### **RINGKASAN**

Definisi kampanye menimbulkan multi tafsir antara lembaga penyelenggara pemilihan umum dengan pihak kepolisian dan kejaksaan dalam menegakkan tindak pidana pemilihan. Hal ini dapat berdampak pada adanya pelanggaran administrasi, akan tetapi tidak dapat dijatuhkan sanksi dikarenakan tidak menjelaskan secara rinci mengenai pelanggaran administrasi tersebut. Oleh karena itu ikhhwal kepastian hukum adalah salah satu aspek utama dalam hukum. Kepastian hukum biasanya diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis. Tahapan kampanye merupakan salah satu tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang cukup penting dan sangat berpengaruh terhadap elektabilitas setiap pasangan calon kepala daerah, karena tahapan ini sebagai sarana dan kesempatan bagi setiap pasangan calon dalam berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat untuk memperkenalkan diri serta menyampaikan visi, misi dan program guna meyakinkan pemilih untuk mendukungnya terlebih pada daerah yang menurut data kurang elektabilitasnya. Oleh karena itu pada tahap kampanye sering terjadi pelanggaran-pelanggaran, baik yang dilakukan oleh pasangan calon secara langsung ataupun melalui tim pemenangan yang dapat juga melaksanakan kampanye. Pelaksanaan kampanye yang tidak tertib mengikuti aturan pelaksanaan kampanye dapat disebut sebagai pelanggaran, yang mana apabila pelanggaran dilakukan maka dapat dikenakan sanksi secara administratif dan/atau pidana. Dalam penanganan pelanggaran baik yang dilaporkan maupun temuan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum hasil dari kegiatan pengawasan aktif, apabila berdasarkan kajian pelanggaran tersebut masuk dalam kategori pelanggaran administrasi Pemilihan maka badan pengawas pemilihan umum dapat merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Kabupaten atau Kota sesuai dengan tingkatannya untuk ditindak lanjuti. Apabila pada kajian awal laporan atau temuan pelanggaran ditemukan dugaan tindak pidana Pemilihan, maka penanganannya dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Yang mana Sentra Penegakan Hukum Terpadu anggotanya terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepolisian, dan Kejaksaan yang mempunyai fungsi sebagai penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan. Setelah melakukan kajian dan pembahasan oleh sentra penegakan hukum terpadu terhadap suatu laporan atau temuan, sentra penegakan hukum terpadu dapat menyimpulkan berdasarkan hasil kajian dan pembahasan apakah peristiwa pada laporan atau temuan tersebut

merupakan tindak pidana Pemilihan atau bukan. Jika peristiwa tersebut merupakan tindak pidana Pemilihan maka direkomendasikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk meneruskan laporan tersebut kepada penyidik Kepolisian untuk dilakukan penyidikan.

Dalam penulisan tesis ini penulis ini menggunakan penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif. Lalu sifat penelitian yaitu preskriptif. Lalu pada pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder yang didapat dari studi kepustakaan. Pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan dengan diinventarisasi dan diidentifikasi.

Dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu. **Pertama.** Pelanggaran kampanye pada tahapan pra pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah bukan termasuk tindak pidana, sebab perbuatan kampanye tersebut di luar jadwal yang ditetapkan komisi pemilihan umum Provinsi dan komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota untuk masing-masing pasangan calon. **Kedua.** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menjadi dasar untuk menegakan pelanggaran yang dilakukan pada tindak pidana pemilihan kepala daerah yang menjadilkan Undang-Undang tersebut sebagai pendekatan penal dalam kebijakan formulasi terhadap pelanggaran pemilihan kepala daerah. Lalu pada kebijakan non penal, menggunakan upaya pencegahan atau *preventif* dalam menanggulangi pelanggaran tindak pidana pemilihan kepala daerah. Terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran pada pemilihan kepala daerah yaitu, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan pelanggaran tindak pidana. Penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah adalah proses pengawasan yang dilaksanakan secara melekat oleh pengawas pemilihan.

**SIAGIAN, MARTIN LEONARDO, 2024. KAMPANYE PADA TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA.** Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H.** 100 halaman.

### **ABSTRAK**

**Kata Kunci:** Kampanye, Pemungutan Suara Ulang, Pemilihan Kepala Daerah

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis untuk menganalisis untuk menganalisis mengenai kampanye pada tahapan pemungutan suara ulang apakah termasuk bagian dari hukum pidana dan untuk menganalisis mengenai kebijakan formulasi terhadap pelanggaran peserta pemilihan kepala daerah.

Dalam penulisan tesis ini penulis ini menggunakan penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Lalu sifat penelitian yaitu preskriptif yaitu ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma. Lalu pada pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder yang didapat dari studi kepustakaan. Pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan dengan diinventarisasi dan diidentifikasi.

Dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu. **Pertama.** Pelanggaran kampanye pada tahapan pra pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah bukan termasuk tindak pidana, sebab perbuatan kampanye tersebut di luar jadwal yang ditetapkan komisi pemilihan umum Provinsi dan komisi pemilihan umum Kabupaten/Kota untuk masing-masing pasangan calon. **Kedua.** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menjadi dasar untuk menegakan pelanggaran yang dilakukan pada tindak pidana pemilihan kepala daerah yang menjadikan Undang-Undang tersebut sebagai pendekatan penal dalam kebijakan formulasi terhadap pelanggaran pemilihan kepala daerah. Lalu pada kebijakan non penal, menggunakan upaya pencegahan atau *preventif* dalam menanggulangi pelanggaran tindak pidana pemilihan kepala daerah. Terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran pada pemilihan kepala daerah yaitu, pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik dan pelanggaran tindak pidana. Penanganan pelanggaran pemilihan kepala daerah adalah proses pengawasan yang dilaksanakan secara melekat oleh pengawas pemilihan.

**SIAGIAN, MARTIN LEONARDO, 2024. CAMPAIGN AT THE VOTING STAGES OF THE REGIONAL HEAD ELECTION FROM A CRIMINAL LAW PERSPECTIVE.** Master of Laws Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor I: **Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.** 100 page.

#### ABSTRACT

**Keywords:** Campaign, Re-Voting, Regional Head Election

*The objectives to be achieved in writing the thesis are to analyze whether the campaign at the re-voting stage is part of criminal law and to analyze policy formulation regarding violations by regional head election participants.*

*In writing this thesis, the author used research with a type of normative legal research, namely research that obtains legal materials by collecting and analyzing legal materials related to the problem to be discussed, then the nature of the research is prescriptive, namely legal science studies the objectives of law, values, justice, validity of legal rules, legal concepts, and norms. Then the research approach uses a statutory approach and a case approach. Legal materials consist of primary and secondary legal materials obtained from literature studies. Processing and analysis of legal materials is carried out by inventorying and identifying them.*

*From the research results there are conclusions namely. First. Campaign violations during the pre-voting stage of re-election of regional heads are not considered criminal acts, because the campaign actions are outside the schedule set by the Provincial general election commission and the Regency/City general election commission for each pair of candidates. Second. Law Number 1 of 2015 is the basis for enforcing violations committed in regional head election crimes which makes this Law a penal approach in formulating policies for regional head election violations. Then in non-penal policies, using preventive or preventive measures to overcome criminal violations of regional head elections. There are 3 (three) types of violations in regional head elections, namely, administrative violations, code of ethics violations and criminal violations. Handling violations in regional head elections is a supervisory process that is carried out closely by election supervisors.*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Mahe Esa, karena penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“KAMPANYE PADA TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERSFEKTIF HUKUM PIDANA”**.

Diselesaikannya penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Para Dosen penguji yang telah berkenanan hadir mulai dari usulan penelitian tesis ini sampai ujian tesis ini.
5. Para Dosen pengajar Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis selama penulis berkuliah.

6. Seluruh karyawan Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan kemudahan kepada penulis selama penulis berkuliah.
7. Teman-teman penulis satu angkatan 2022 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Teman-teman di institusi Polisi Republik Indonesia khususnya di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Banjarmasin.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca.

Banjarmasin, 27 Juni 2024  
Penulis.

Martin Leonardo Siagian  
22202115310031

## DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> ..... 1
	A. LATAR BELAKANG MASALAH..... 1
	B. RUMUSAN MASALAH ..... 8
	C. KEASLIAN PENELITIAN..... 8
	D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN..... 11
	E. TINJAUAN PUSTAKA..... 12
	F. METODE PENELITIAN ..... 19
	G. SISTEMATIKA PENULISAN ..... 23
<b>BAB II</b>	<b>KAMPANYE PADA TAHAPAN PRA PEMUNGUTAN</b>
	<b>SUARA ULANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH</b>
	<b>DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA</b> ..... 25
	A. Kampanye Pada Tahapan Pra Pemungutan Suara Ulang
	Pemilihan Kepala Daerah..... 25
	B. Pelanggaran Kampanye Pada Tahapan Pra Pemungutan
	Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah ..... 65
<b>BAB III</b>	<b>KEBIJAKAN FORMULASI TERHADAP PELANGGARAN</b>
	<b>PRA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN</b>
	<b>KEPALA DAERAH</b> ..... 70
	A. Kebijakan Penal dan Kebijakan Non Penal Dalam
	Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah..... 70
	B. Pengaturan Ideal Pada Pemilihan Kepala Daerah
	Dalam Pemungutan Suara Ulang di Masa Yang
	Akan Datang..... 91
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> ..... 97
	A. Kesimpulan..... 97
	B. Saran..... 99
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	